


## THE ROLE OF THE SOCIAL SERVICES AND REHABILITATION CENTER FOR PERSONS WITH SOCIAL WELFARE PROBLEMS (PMKS) OF THE EAST JAVA PROVINCIAL SOCIAL SERVICE IN PSYCHOTIC SERVICES

Alma Ida 1, Ahmad Riyadh UB

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b> Received Feb 21, 2024 Revised March 16, 2024 Accepted March 17, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Service-People With Social Welfare Problems- Psychotic</p>	<p>This research study is to analyze the role of social service and rehabilitation centers for Persons with Social Welfare Problems (PMKS) of the East Java Provincial Social Service in serving people with psychotics. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach, by conducting interviews, documentation and observation. The results of the research obtained show that: First, the Facilitative Role in services is to meet the basic needs of PMKS by meeting the needs of facilities and infrastructure as well as clothing and food needs for PMKS. Second, the role of education in services at the PMKS Center is currently very helpful for PMKS where various programs and training have been provided to improve the welfare of people with social welfare problems (PMKS). Third, the Representational Role in PMKS center services has collaborated with various institutions and agencies to obtain external resources for training to develop the potential of each different person. Fourth, the technical role in the PMKS center is very helpful in assessing needs for developing individual, group and community potential</p> <p style="text-align: right;">This is an open-access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">CC-BY 4.0</a> license.</p> 

**Corresponding Author:**

**Ahmad Riyadh UB**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email- riyadh\_ub@umsida.ac.id

### INTRODUCTION

Negara Indonesia merupakan Negara yang membawa ide atau gagasan Negara kesejahteraan hal tersebut terdapat dalam undang-undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia memuat arah Negara yang menerangkan gagasan Negara kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi kehidupan yang harus di wujudkan baik itu spiritual maupun material yang berdasarkan pada rasa kesusilaan, keselamatan, ketrentaman lahir batin yang memiliki kemungkinan untuk setiap warga mengadakan kebutuhan sosial, jasmani dan rohani [1]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maksud dari penyandang memiliki arti seseorang yang menderita (menyandang) sesuatu. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1997 dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebut bahwasanya penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan dalam hal sensorik, fisik, mental, dan intelektual. Pemerintah dan

masyarakat memiliki kewajiban untuk mengupayakan rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali serta melakukan perkembangan pada kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi penyandang tersebut, hal ini dilakukan seorang secara wajar dapat melaksanakan fungsi sosial dengan bakat kemampuan Pendidikan dan pengalamannya [2].

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosia (social being) artinya manusia membutuhkan suatu interaksi atau hubungan sosial dengan orang-orang terdekat dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia tidak bisa menghindari kebutuhan maupun dukungan sosial (social support) dari sekitarnya, yakni bisa berbentuk perhatian, penghiburan, penerimaan atau bantuan dari orang lain. Kita tahu bahwa Indonesia tergolong Negara berkembang akan tetapi masih bisa dikatakan belum mampu untuk meminimalisir masalah sosial. Dari banyaknya masalah sosial yang ada di Indonesia terutama gelandangan, pengemis, psikotik, anak jalanan dan wanita tuna susila (WTS) yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, karena sampai saat ini masalah sosial tersebut semakin marak di kota-kota besar. Dengan adanya pberbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial di perkotaan memang sangat meresahkan dan mengganggu keindahan kota. Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi dan tidak mendapatkan penanganan secara serius, pemerintah mengarahkan Satpol PP agar merazia disetiap kota hingga ke sudut kota yang selanjutnya dibawa dan ditampung agar dibina dan dibimbing di Balai Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Pelayanan Penyandang Psikotik. Hal tersebut tidak luput dari pengawasan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tujuannya agar dikawasan kota tidak lagi dijumpai berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis, gelandangan, anak jalanan, psikotik/odgj, dan Wanita Tuna Susila (WTS).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang yang mengalami suatu permasalahan sosial yang memiliki kesulitan atau gangguan dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial). Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum sepenuhnya habis, permasalahan-permasalahan tersebut dapat berupa kemiskinan yang tidak kunjung berakhir, ketelantaran, gangguan mental atau kecacatan. Dan jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan yang akan menurun. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sebagian besar penyandang masalah kesejahteraan sosial itu ada penyakit psikotiknya, psikotik sendiri dapat diartikan sejenis gangguan terhadap fungsi otak yang disebabkan oleh faktor diantaranya termasuk perubahan kimiawai otak, perubahan dalam struktur otak, dan faktor-faktor genetik, penderita psikotik ini hampir sama dengan gejala gangguan skizofrenia [3].

Pada saat ini pendidikan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat semua golongan, oleh karena itu pendidikan mempunyai tanggung jawab besar terhadap pembentukan karakter bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali, pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan yang dapat mengantarkan kepada kualitas pendidikan yang mumpuni karena pada jalur pendidikan ini terdapat kurikulum pembelajaran yang menekankan pada pengembangan diri dan keterampilan (life skill). Pemerataan dan perluasan akses dibidang pendidikan nonformal perlu ditingkatkan

dengan dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai program yang mengarah pada pembekalan peserta didik tentang sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik spektrum pedesaan, perkotaan dan nasional [4]. Pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian [5].

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial yang merupakan suatu kondisi yang diharuskan untuk diwujudkan bagi keseluruhan warga Indonesia di untuk memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial merupakan terpenuhinya kondisi kebutuhan spiritual, material, dan sosial masyarakat Indonesia agar mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu melakukan pengembangan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Dalam hal ini, Kementrian Sosial mengamanatkan kepada Dinas Sosial masing-masing wilayah untuk memberikan perhatian khusus kepada PMKS dengan memfasilitasi rehabilitasi sosial, memberikan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan. Kesejahteraan sosial merupakan tugas utama bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, beberapa hal yang perlu dilakukan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara tertentu, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat serta peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [5].

Tanggal 27 Februari Tahun 1975 hingga Tahun 1976 berdasarkan Departemen Sosial oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk panti asuhan yang diberi nama Panti Rehabilitasi Sosial atau yang di singkat dengan (PRS) dengan tujuan untuk penanganan orang terlantar, gelandangan dan pengemis. Dan setelah itu Sasana Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Orang Terlantar yang di singkat dengan (SRPGOT). Adapun, beberapa jenis PMKS yang dijelaskan pada Permensos No. 8 Tahun 2012, seperti Gelandangan, Pengemis, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar, Anak Jalanan, dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Penjelasan tersebut merupakan sebagian dari jenis klien PMKS yang ditangani oleh Liponsos Keputih Surabaya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan seorang individu atau kelompok dalam masyarakat yang mempunyai gangguan sehingga belum bisa menjalankan kewajiban sosialnya, kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi (sosial, jasmani, rohani) secara memadai [6]. Dengan bersebaran permasalahan mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terdapat dalam berbagai wilayah, terlebih dalam wilayah perkotaan. Penyandang masalah kesejahteraan memiliki kategori atau jenis yang beragam antara lain yaitu anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan psikotik. Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada Tahun 1997 dengan membangun Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) di Keputih untuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang asalnya dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Liponsos didirikan dengan tujuan merehabilitasi kepada seseorang yang memiliki gangguan mental atau jiwa yang lebih sering disebut dengan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), pengemis, gelandangan, lansia terlantar dan anak jalanan.

Tanggal 23 April tahun 1994 berubah nama menjadi PSBK (Panti Sosial Bina Karya) atau yang lebih dikenal dengan “Mardi Mulyo”. Dan kemudian pada tanggal 12 November tahun 2012 dengan berlandaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 73 tahun 2012 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis, Rehabilitasi Sosial Gepeng berali sebagai Balai Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur [7].

Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu badan yang dibentuk pemerintah dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk penampungan 5 (lima) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti Gelandangan, Pengemis, Psikotik, Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila (WTS). Dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut. Di Balai ini terdapat 5 jenis Penyandang yaitu penyandang gelandangan berjumlah 44 jiwa, penyandang pengemis berjumlah 3 jiwa, penyandang psikotik berjumlah 101 jiwa, anak jalanan berjumlah 2 jiwa, dan Wanita Tuna Susila (WTS) berjumlah 0 jiwa.

**Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2021, 2022, 2023**

<u>Tahun</u>	<u>Daya Tampung</u>	<u>Jumlah Yang Ditampung</u>
2021	150 Jiwa	222 Jiwa
2022	150 Jiwa	238 Jiwa
2023	150 Jiwa	199 Jiwa

Sumber : Diolah dari Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2023

Di Balai ini sebagian besar penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah penyandang psikotik. Psikotik juga bisa diartikan dengan seseorang yang mengalami gangguan terhadap mental atau jiwa yang berat dan kacau ditandai dengan ketidakmampuan membedakan hal nyata dan fantasi (tidak nyata) dan psikotik akan mengalami gejala seperti halusinasi. Contohnya seperti berbicara sendiri, marah tanpa sebab, tertawa sendiri dan menangis sendiri tanpa sebab. Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki struktur organisasi seperti Unit TU, Unit Pelayanan, Unit Rehabilitasi Sosial, Unit Pekerja Sosial, kemudian juru masak untuk memasak makanan untuk penyandang serta bagian membersihkan. Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga menempatkan posisi penting bertujuan agar mensejahterakan serta memfungsikan kembali atau menyempurnakan kemahiran fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas khususnya terhadap penyandang psikotik.

Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban menjalankan berbagai macam tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan, dengan merawat atau merehabilitasi 5 (lima) Penyandang dengan memberikan berbagai pelayanan seperti memberikan Bimbingan Mental Agama, Bimbingan Sosial, Bimbingan Kedisiplinan, Bimbingan Olahraga, dan Bimbingan Keterampilan (pembuatan paving, handy craf dan pertanian). Hal ini di harapkan agar berbagai program pelayanan yang diberikan oleh Balai PMKS dapat bermanfaat bagi penerima manfaat tersebut sehingga bisa memiliki ilmu dan keterampilan di bidang tertentu, sehingga apabila di pulangkan kepada pihak keluarganya penerima manfaat tersebut mendapatkan bekal yang bisa dikembangkan sehingga bisa membuka usaha sendiri, bekerja mandiri serta dapat berkeaktivitas sendiri. Selain itu penerima manfaat di Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini fluktuatif yang artinya penerimaan dan rujukan atau pemulangan tidak tentu. Dengan dibekali berbagai ilmu selama bimbingan dan pembinaan penerima manfaat dapat dpulangkan kepada pihak keluarga apabila sudah sembuh 80%. Daya tampung yang diterima oleh Balai PMKS hanya 150 jiwa akan tetapi dengan belum terminimalisirkan masalah sosial yang ada terutama untuk PMKS sehingga daya tampung di Balai melebihi kapasitas yang disediakan oleh Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sehingga Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyediakan ruangan atau kamar yang dan memberikan fasilitas yang cukup baik apabila terdapat rujukan ke Pihak Balai PMKS.

### **Tabel 1.2 Data Jenis PMKS**

DATA KLIEN 2021 SESUAI DENGAN JENIS PMKS

NO	BULAN	JENIS PMKS									TOTAL	
		Gelandangan		Pengemis		Psikotik		Anjal		WTS	L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	P		
1.	Januari	24	9	4	1	65	44	1	0	0	94	56
2.	Februari	23	10	5	1	64	45	2	0	0	94	56
3.	Maret	22	10	5	1	65	45	2	0	0	94	56
4.	April	23	9	5	1	68	43	1	0	0	97	53
5.	Mei	19	9	5	1	75	40	1	0	0	97	53
6.	Juni	21	9	4	1	72	42	1	0	0	97	53
7.	Juli	24	12	4	1	68	40	1	0	0	97	53
8.	Agustus	23	10	4	1	70	42	0	0	0	97	53
9.	September	20	14	4	1	66	45	0	2	2	97	53
10.	Oktober	28	14	5	1	57	44	1	0	0	91	59
11.	November	26	12	5	1	59	46	1	0	0	91	59
12.	Desember	23	11	2	5	59	49	1	0	0	88	62
	TOTAL	276	129	52	16	788	525	12	2	2	113	666

Sumber : Diolah dari Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2023

Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan Pusat Pelayanan Sosial yang memberikan pelayanan dasar, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan tingkat pertama bagi PMKS. Permasalahan PMKS khususnya pada penyandang psikotik telah mendapatkan penanganan melalui berbagai peran edukasi yang diberikan, dengan berbagai macam edukasi telah diberikan oleh pihak Balai bagi penerima manfaat. Adanya peran edukasi yang sudah berjalan seperti bimbingan keagamaan, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan psikolog ini lebih di khususkan kepada penerima manfaat psikotik, gelandangan, dan pengemis dalam meningkatkan serta pengembangan diri melalui berbagai edukasi yang telah diberikan.

Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur benar-benar diperlukan untuk mengatasi penyandang psikotik, pengemis dan gelandangan. Maka dari itu Peran Balai bisa meredakan persoalan yang ada dalam kesejahteraan sosial. Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai balai dibentuk bertujuan memberikan kesejahteraan sosial serta memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau mental. Dalam hal ini untuk mewujudkan memberikan bimbingan serta pembinaan dengan memberikan berbagai kegiatan atau program antara lain yaitu program dalam pembinaan untuk PMKS. Pada dasarnya kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya seluruh kepentingan hidup masyarakat baik itu secara jasmani, rohani maupun sosial. Dan dari persoalan tersebut masih memerlukan kepedulian dari pihak lain terutama bagi Pemerintahan. Seperti melakukan seperti melakukan pelatihan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Hal tersebut juga seiring bersama berbagai penelitian terdahulu, diantaranya penelitian berjudul “Peran Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Sidoarjo Dalam Membina Klien”. Jenis penelitian

menggunakan metode kualitatif. Hasil ini ditemukan bahwa peran dari Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Sidoarjo dalam melakukan pembinaan terhadap klien telah maksimal, hal tersebut bisa diketahui melalui tingkat aktivitas, bimbingan sosial programnya, serta sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. Persamaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yakni meneliti proses peran balai PMKS. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya merujuk pada 3 penyandang kesejahteraan sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini lebih kepada penyandang psikotik [8].

Kedua, penelitian dengan judul (Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Manado (Studi Kasus Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama memakai metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada anak terlantar sedangkan saat ini penelitian lebih fokus pada penyandang psikotik [9].

Ketiga, penelitian dengan judul (Peran Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Desa Grinting). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama meneliti tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, peneliti sebelumnya berfokus pada penyandang gelandangan dan pengemis, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penyandang psikotik [10].

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang dimana selalu membutuhkan bantuan karena tidak dapat hidup sendiri dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disebut dengan PMKS, kerap kali menjadi isu permasalahan di berbagai wilayah yang tidak ada hentinya. PMKS Kota Sidoarjo sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 83 memiliki tugas yakni dengan melaksanakan sebagian tugas dinas sebagai penampung sementara atau pertama, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita tuna susila (WTS) dan penyandang psikotik. Selain itu program pelayanan kesejahteraan sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo yaitu Pelayanan kebutuhan dasar seperti pemberian makan dan minum tiga kali sehari, pengasramaan, pemberian pakaian, pemberian alat kebersihan pemeriksaan kesehatan (puskesmas & psikiater) dan pemberian obat-obatan (sakit fisik & non fisik/mental).

Berdasarkan hasil observasi lapangan terdapat beberapa masalah sosial yang banyak ditemui termasuk pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diantaranya daya tampung Balai PMKS melebihi kapasitas dari jumlah yang di Rehabilitasi, oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Peran Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Pelayanan Penyandang Psikotik. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai dalam memberikan bimbingan dan pembelajaran kegiatan dalam mengembangkan pendidikan,

keterampilan serta memberikan kehidupan yang berkualitas untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan teori Peran, Peran adalah mengembangkan kapasitas masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan. Yang terdapat 4 indikator yaitu 1) Peran Fasilitatif, berupa asrama untuk PMKS serta kebutuhan sandang pangan yang terpenuhi. 2) Peran Edukasi, berupa penyuluhan atau pengarahan tentang masalah kesehatan, peningkatan kesadaran, memberikan informasi yang menjadikan penyandang mandiri aktif dan berdaya guna. 3) Peran representasional, dengan cara memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan minatnya agar dapat meningkatkan produktivitas penerima manfaat. 4) Peran Teknis, yakni membantu kebutuhan PMKS dalam pengumpulan data. [11]

## **METHODS**

Setiap penelitian memiliki metode-metode yang digunakan, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh, diolah, dan dideskripsikan. Penggunaan metode yang dipilih oleh penulis yakni penelitian kualitatif agar dapat menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai fenomena dan realita yang diteliti dari hasil observasi dan wawancara mengenai Peran Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Pelayanan Penyandang Psikotik. Dengan menerapkan teori Peran dalam buku Community Development, Peran adalah mengembangkan kapasitas masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan. Yang terdapat 4 indikator yaitu 1) Peran Fasilitatif 2) Peran Edukasi 3) Peran representasional 4) Peran Teknis. Analisis data yang dilakukan dalam model penelitian ini melalui beberapa cara pertama, dengan cara kualitatif yakni dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Kemudian analisis data dari yang diperoleh saat proses pengumpulan data maka dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan- permasalahan sosial khususnya pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [11].

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama Observasi, merupakan kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian meliputi peninjauan di lapangan, observasi dilakukan secara langsung untuk memperoleh data penelitian. Kedua Wawancara, dengan melakukan wawancara peneliti memperoleh semua informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data. Ketiga Dokumentasi, dokumentasi merupakan komponen pendukung dalam penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan observasi, dokumentasi juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan benar, tidak ada rekayasa di dalamnya [12].

## **RESULTS AND DISCUSSION**

Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah salah satu badan yang dibentuk



oleh Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk memberi pelayanan kepada penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya untuk Penyandang Psikotik, yang berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik. Dalam pelaksanaan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini sangatlah penting karena pada umumnya penyandang masalah kesejahteraan sosial sangat rentan sekali pada permasalahan kondisi psikologi maupun fisik bukan hanya itu saja penyandang psikotik juga sangat membutuhkan perhatian yang khusus seperti perhatian kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, ekonomi, psikologi serta kebutuhan sehari-harinya seperti kebutuhan sandang pangan papan. Perhatian lebih yang didapatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya penyandang psikotik berdampak baik terhadap perkembangan dirinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi, masih adanya masalah sosial seperti gelandangan, pengemis, psikotik, anak jalanan, dan Wanita Tuna Susila (WTS) ini masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama oleh Dinas Sosial. Perhatian yang lebih akan berdampak baik terhadap perkembangannya, perhatian khusus tersebut seperti perhatian kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, ekonomi, psikologi serta kebutuhan sehari-harinya seperti kebutuhan sandang pangan papan. Peningkatan kesejahteraan sosial pada PMKS dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yakni dengan melihat kualitas hidup PMKS dari segi fisik, materi, mental dan spiritual. Balai PMKS juga berperan dalam kegiatan yang memperhatikan fungsi sosial, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman serta tersenggalarnya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial PMKS. Sehingga dapat terwujud kemandirian dan peningkatan kesejahteraan PMKS agar mereka tidak merasa terpuruk dengan kondisi yang mereka alami.

Penanganan yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sangat berarti dalam peningkatan kesejahteraan sosial, karena penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan masyarakat atau kelompok yang yang seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga akan tetapi dengan adanya beberapa PMKS yang mengalami gangguan mental atau jiwa yang menjadi tanggung jawab Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS untuk menjadikan penerima manfaat menjadi meningkat kesejahteraan serta kehidupannya. Oleh sebab itu Peran Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam menangani PMKS perlu dilakukan dengan sebaik mungkin, agar berkurangnya populasi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Maka dari itu Peran Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Pelayanan Penyandang Psikotik, menunjukkan kinerjanya terhadap permasalahan yang terjadi pada penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) dengan memberikan peran-peran sebagai berikut:

### **1) Peran Fasilitatif**

Peran Fasilitatif dalam penjelasannya menyatakan bahwa peran fasilitatif yaitu untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok dan masyarakat, bukan hanya itu saja dalam menjalankan peran fasilitatifnya terdapat peran khusus yang dimiliki Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu dengan memberi fasilitas sarana prasarana, sandang pangan dan papan yang dibutuhkan oleh para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan memberikan berbagai fasilitas tentunya akan memberikan semangat bagi penerima manfaat ketika diberikan program pelayanan atau pelatihan.

Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki program fasilitas pelayanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial, dari ketiga tersebut mencakup kepada fasilitas yang diberikan oleh Balai PMKS. Selain itu Balai PMKS memfasilitasi atau memberi sarana vital sebagai tempat pelayanan sosial dengan menyediakan tempat tinggal yaitu “Asrama” untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial, selama di asrama mereka difasilitasi kamar tidur dengan kapasitas yang disediakan dan dipisahkan sesuai jenis kelamin serta di pisahkan sesuai dengan tingkat kelas kejiwaannya. Pengasramaan terbagi berdasarkan sistem Clustering.

1. Cluster gelandangan (di asrama kelas IV putra mulawarman dan asrama kelas IV putri Pattimura)
2. Cluster psikotik tingkat rendah (di asrama kelas III putra Diponegoro dan asrama kelas II putri Dewi Sartika)
3. Cluster psikotik tingkat sedang (di asrama Cut Mutia dan asrama kelas II putri Dewi Sartika)
4. Cluster anjal / WTS (di asrama Hasanuddin)

Untuk pembagian cluster kamar tersebut dibedakan menjadi 4 cluster yang terbagi sesuai dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Untuk cluster gelandangan dan terbagi menjadi 2 kelas yaitu kelas IV putra mulawan dan kelas IV putri pattimura cluster tersebut dibagi sesuai dengan kondisi PMKS yang tidak mengalami gangguan jiwa atau mental. Cluster Psikotik rendah juga terbagi menjadi 2 kelas yaitu kelas II putra Diponegoro dan kelas II putri Dewi Sartika, cluster tersebut sesuai dengan kondisi PMKS psikotik tingkat rendah. Kemudian Cluster psikotik tingkat sedang juga terbagi menjadi 2 kelas yaitu kelas Cut Mutia dan kelas putri Dewi Sartika dengan tingkat penyandang psikotik tingkat sedang. Dan Cluster anak jalanan dan wanita tuna susila (WTS) di kelas Hasanuddin.

Fasilitas untuk ruang bimbingan serta fasilitas untuk pelayanan kesehatan juga diberikan oleh pihak balai, fasilitas ruang bimbingan yang diberikan oleh Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat digunakan untuk bimbingan keterampilan seperti menjahit, sulam pita dan lain sebagainya. Untuk ruang pelayanan kesehatan juga dapat digunakan untuk memeriksa kesehatan penerima manfaat secara terjadwal dengan dokter dari puskesmas maupun dari dokter rumah sakit jiwa. Selain itu juga adanya berbagai fasilitas lainnya seperti mushola untuk ibadah, ruang dapur umum untuk tempat memasak makanan PMKS, ruang isolasi ini digunakan untuk pengamanan sementara apabila penyandang psikotik mengalami kambuh kondisi kejiwaannya, ruang pos jaga ini untuk keamanan atau penjagaan balai PMKS, ruang gudang digunakan sebagai gtempat

penyimpanan barang yang sudah dipakai maupun yang akan digunakan, ruang rapat digunakan untuk tempat rapat yang digunakan oleh pihak balai, ruang kantor yang digunakan sebagai tempat pihak balai untuk bekerja, serta rumah dinas yang di gunakan sebagai tempat tinggal beberapa pegawai balai PMKS.

**Tabel 3** Sarana dan Prasarana Balai PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Sarana	Volume	Peruntukan
1	Ruang kantor	2 Unit	Tempat Pegawai Bekerja
2	Rumah Dinas Jabatan	1 Unit	Tempat tinggal dinas Kepala balai
3	Asrama	6 unit	Tempat tinggal PMKS
4	Ruang serba guna	2 unit	Untuk pertemuan
5	Ruang ketrampilan kerja	2 unit	Untuk ketrampilan kerja
6	Masjid	1 unit	Untuk Ibadah
7	Ruang dapur umum	1 unit	Untuk kegiatan memasak
8	Ruang Isolasi	<u>1 unit</u>	<u>Untuk pengamanan sementara</u>
9	Ruang Rapat	<u>1 unit</u>	<u>Untuk rapat kantor</u>
10	Pos Jaga	<u>1 unit</u>	<u>Untuk Penjagaan</u>
11	Ruang Koperasi	<u>1 unit</u>	<u>Untuk Pelayanan Simpan Pinjam</u>
12	Ruang gudang	<u>1 unit</u>	<u>Penyimpanan barang</u>
13	Lapangan upacara	<u>2 unit</u>	<u>Untuk upacara kantor</u>
14	Ruang Bimbingan	<u>1 unit</u>	<u>Untuk bimbingan PMKS</u>
15	Poliklinik	<u>1 unit</u>	<u>Pemeriksaan kesehatan PMKS</u>
16	Kendaraan roda empat	<u>3 unit</u>	Mobil kepala Balai, Mobil Operasional, dan Mobil Ambulance
17	Kendaraan roda dua	<u>3 unit</u>	<u>Operasional kantor</u>

*Sumber : Diolah dari Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2023*

Selain fasilitas tempat tidur yang diberikan terdapat beberapa kebutuhan pokok yang diberikan seperti pakaian, obat-obatan, pemberian makanan 3 kali dalam sehari,

bukan hanya itu fasilitas kesehatanpun diberikan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama kepada penyandang psikotik agar tetap terjamin kondisi kesehatannya. Fasilitas kesehatan yang diberikan yaitu, jaminan sosial kesehatan seperti pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya psikotik. Dengan memberikan kebutuhan pokok yang dibutuhkan PMKS tentunya terdapat berbagai fasilitas yang diberikan antara lain seperti ruang makan, ruang keterampilan, ruang kesehatan, ruang bimbingan.

Wawancara dengan Ibu Aulia selaku ahli pekerja sosial (PEKSOS) :

“Disini untuk fasilitas mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti memberikan makanan yang diberikan 3 kali dalam sehari, pengasramaan di bagi menjadi beberapa cluster sesuai dengan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) dan lain-lain“ (wawancara tanggal 05 Juli 2023).

Dengan memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dasar PMKS, Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga memberikan beberapa fasilitas ruangan untuk tempat makan, ruangan bimbingan, mushola untuk tempat beribadah bagi PMKS dan lain sebagainya. Dalam peran fasilitatif ini sudah cukup memberikan manfaat baik kepada PMKS karena membentuk perhatian dasar seperti terpenuhinya kebutuhan standar hidup dan memudahkan PMKS dalam mendapatkan fasilitas dan sarana prasarana yang sebelumnya tidak didapatkan dengan baik. Dengan demikian Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sudah berupaya memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama kepada Penyandang Psikotik.

Fenomena yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan teori peran fasilitatif telah sesuai dengan pendapat [11] bahwa Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam peran fasilitatif sudah dapat dikatakan cukup baik, dengan memberikan berbagai fasilitas untuk penerima manfaat agar dalam masa rehabilitasi PMKS merasa terpenuhi dan tercukupi kebutuhannya. Peran fasilitatif yang dilaksanakan meliputi pemberian dorongan/motivasi, pemberian jaminan sosial dan rehabilitasi sosial. Pemberian rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pemberian alat bantu seperti alat kesehatan atau obat-obatan pemberian kamar untuk tempat istirahat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh pendamping dengan memberikan penuh arahan dan juga memfasilitasi apabila terjadi kendala dalam masing-masing kegiatan tersebut.

## 2) Peran Edukasi

Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sangat diharapkan untuk bisa memberikan peran edukasi dalam penentuan kegiatan untuk para Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas saja akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan serta pengalaman bagi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Peran Edukasi ini dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai penyuluhan dan pelatihan, untuk penyuluhan bisa terkait masalah kesehatan, peningkatan kesadaran. Memberikan berbagai pelatihan, program-program yang direncanakan dan diagendakan setiap harinya untuk membina dan membimbing PMKS agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Program-program tersebut yaitu Bimbingan Keagamaan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Kedisiplinan, Bimbingan Olahraga, Bimbingan Keterampilan.



**Gambar 1. Program-Program Bimbingan**

Sumber : Diolah dari Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2023

Pertama, Bimbingan Keagamaan. Bimbingan keagamaan islam yang diberikan kepada penerima manfaat sangat bermanfaat dalam menunjang kesembuhan dari penyakit mental yang mereka alami, dengan adanya bimbingan keagamaan ini diharapkan penerima manfaat bisa termotivasi untuk cepat sembuh dan dapat berlaku secara normal di masyarakat. Bimbingan keagamaan memiliki tujuan agar terpenuhi kebutuhan dasar manusia yang beragama, meskipun mereka memiliki keterbatasan tetap harus di pandang sebagai manusia yang normal dan membutuhkan pelayanan fisik, rohani, sosial dan psikologis. Bimbingan agama islam di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini diwajibkan bagi PMKS yang beragama islam, akan tetapi dengan kondisi PMKS yang berbeda-beda sehingga beberapa dari penerima manfaat tersebut tidak dapat mengikuti bimbingan agama tersebut.

Penerima manfaat yang berada dalam masa tenang atau sudah tidak kambuh lagi mereka dapat menjalani masa sosialisasi dan mampu beraktivitas seperti biasanya

meskipun mereka belum bisa dikatakan sembuh dan sehat secara total. Dalam bimbingan agama islam ini lebih mengedepankan materi yang diterapkan pada penerima manfaat sebagai proses pembekalan dalam dirinya. Materi adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam rangka suksesnya bimbingan agama, karena harus mengetahui kebutuhan dari masing-masing PMKS dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi PMKS.

Kedua, Bimbingan Sosial. Bimbingan sosial di Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dibimbing oleh pekerja sosial (PEKSOS) dari PMKS Sidoarjo dari PMKS Sidoarjo sendiri yang bertujuan untuk melatih PMKS dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan membantu mengatasi permasalahan PMKS. Bimbingan sosial ini lebih mengarah pada rehabilitasi perilaku yakni bagian dari proses rehabilitasi sosial melalui pelayanan perubahan perilaku.

Terdapat macam-macam bimbingan sosial yang diberikan oleh Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo antara lain seperti Bimbingan Sosial individu, bimbingan ini dilakukan dengan cara penerima manfaat dibimbing satu persatu dan secara tenang ketika diberikan motivasi yang mendukung. Bimbingan Sosial Kelompok, bimbingan ini dilakukan dengan memberikan materi yang sama secara bersama-sama. Bimbingan Sosial Organisasi dan Kemasyarakatan (social organization and development) merupakan metode yang digunakan pekerja sosial untuk membantu penerima manfaat untuk menerima, mengembangkan dan mengontrol perilaku PMKS dalam meningkatkan perannya dalam hidup bermasyarakat.

Dengan berbagai program bimbingan sosial yang diterapkan dalam menunjang keberhasilan program rehabilitasi pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti bimbingan individu yang harus menceritakan permasalahannya, bimbingan kelompok yang mengharuskan penyandang psikotik bergaul atau membaaur dengan teman-temannya dan bimbingan sosial kelompok yang mengharuskan PMKS dapat menjalin hubungan sosial di lingkungannya.

Ketiga, Bimbingan Keterampilan. Rehabilitasi karya atau keterampilan di Balai adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pihak Balai terhadap PMKS yang bertujuan untuk membantu penerima manfaat menjadi lebih aktif dan kreatif dalam kehidupannya. Hal ini sangat berpengaruh kepada penerima manfaat yang akan hidup kedepannya di lingkungan masyarakat. Di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini juga dibekali bimbingan keterampilan, dimana mereka untuk kedepannya memiliki kreatifitas dan bisa bekerja dalam lingkungan masyarakat.

PMKS yang memiliki latar belakangnya dari gelandangan dan pengemis yang istilahnya tidak dalam keadaan sakit pada kejiwaannya mereka diberikan pekerjaan keterampilan berupa pertanian dan sulam pita. Penerima manfaat dibekali pekerjaan pertanian dan sulam pita tujuannya agar suatu saat jika penerima manfaat sudah sembuh 80% mereka akan dipulangkan kembali ke keluarganya dan kembali diterima di tengah-

tengah masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial. Jadi PMKS disini juga dibekali layaknya manusia pada umumnya yang akan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Kris selaku bidang Rehabilitasi Sosial (RESOS) :

“Dalam bimbingan keterampilan tentunya tidak lepas dari instruktur atau pelatih dalam keterampilan tersebut, dalam bimbingan keterampilan sulam pita di bimbingan oleh ibu cathrin” (wawancara tanggal 18 juli 2023)

Bimbingan Pertanian, Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dibimbing dalam bertani sehingga hasil dari pertanian tersebut dapat bermanfaat untuk kedepannya terutama dirinya sendiri dan Instansi. Bimbingan Sulam Pita penerima manfaat juga diajarkan untuk berkreatifitas seperti membuat sulam pita, hal ini bukan hanya untuk PMKS wanita akan tetapi semua penerima manfaat yang memiliki bakat dalam berkreatifitas sulam pita. Semua bimbingan keterampilan ini hanya dikhususkan untuk penerima manfaat gelandangan dan pengemis saja, tidak untuk penyandang osikotik karena bimbingan keterampilan ini membutuhkan pengajaran yang khusus dan dengan PMKS yang benar-benar sanggup menekuni dalam bidang ini.

Keempat, Bimbingan Psikolog atau Mental. Rehabilitasi sosial psikologis adalah proses pengembalian kondisi mental psikis yang dalam keadaan tidak normal agar kondisi ketenangan dalam dirinya dapat berfungsi selayaknya manusia sosial pada hakikatnya. Tujuan dari bimbingan psikolog atau mental ini agar penerima manfaat mampu menjalankan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dalam Peran Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Pelayanan Penyandang Psikotik mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan peran edukasi yang dapat menentukan berjalannya suatu pelaksanaan yang dilakukan untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama kepada Penyandang Psikotik yang di fokuskan oleh peneliti. Bukan hanya itu saja Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo mampu membantu penyandang psikotik untuk bisa meningkatkan pengetahuan serta merubah pola fikir hidupnya menjadi lebih baik lagi. Dengan cara Balai PMKS memberikan penyuluhan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan dengan memberikan edukasi-edukasi untuk meningkatkan pengetahuan para penerima manfaat. Edukasi-edukasi yang diberikan kepada penerima manfaat yaitu seperti edukasi tentang kesehatan, kerohanian dan mental spiritual yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut.

**Tabel 4 Program-Program Bimbingan Balai PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2021 dan 2022**

<u>Tahun</u>	<u>Program Bimbingan</u>
2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Bimbingan Keagamaan</u></li> <li>2. <u>Bimbingan Sosial</u></li> <li>3. <u>Bimbingan Kedisiplinan</u></li> </ol>
2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. <u>Bimbingan Keterampilan</u></li> <li>1. <u>Bimbingan Keagamaan</u></li> <li>2. <u>Bimbingan Sosial</u></li> <li>3. <u>Bimbingan Kedisiplinan</u></li> <li>4. <u>Bimbingan Keterampilan</u></li> </ol>

*Sumber : Diolah dari Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2023*

Selain itu, Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2023 juga memberikan penyuluhan serta pengalaman kepada individu atau kelompok dengan mengadakan pembinaan karakter sesuai dengan yang ditentukan. Tujuannya agar penerima manfaat dapat membentuk diri menjadi tangguh dan berakhlak mulia serta menjadikan penerima manfaat menjadi produktif dan sehat. Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan peran edukasi ini dan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Bimbingan mental psikologis ini meliputi terapi dinamika kelompok dan konseling individu. Asumsi ini adalah bahwa alam sadar manusia sebagian besar terdiri dari struktur kejiwaan manusia. Dengan kata lain bahwa kondisi kejiwaan manusia cenderung dalam keadaan konflik permanen.

Metode-metode yang diterapkan sangat kompleks dalam menunjang keberhasilan program pelayanan rehabilitasi kepada PMKS seperti bimbingan individu yang mengharuskan menceritakan permasalahannya, bimbingan kelompok yang mengharuskan penyandang psikotik bergaul dengan temannya dan bimbingan sosial kelompok yang mengharuskan penerima manfaat dapat menjalin hubungan sosial di lingkungannya.

Untuk variable peran edukasi sangatlah penting, dalam memberikan berbagai macam program pelayanan kepada penerima manfaat. Dengan memberikan berbagai program bimbingan dan keterampilan, dapat disimpulkan bahwa peran edukasi yang telah diberikan oleh pihak balai kepada PMKS [11]. Dimana dengan memberikan peran edukasi ini bisa memberikan dampak positif untuk mencapai tujuan Peran Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PMKS). Peran edukasi meliputi peningkatan pengetahuan dan



keterampilan, pemberian informasi terkait potensi berpeluang, peningkatan kesadaran masyarakat disabilitas dan pelatihan. Pemberian informasi atau pelatihan terkait potensi berpeluang melalui sosialisasi dan memanfaatkan komunitas sebagai jembatan penghubung.

### 3) Peran Representasional

Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berperan representatif dan berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, bertujuan untuk kepentingan individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan dan bimbingan pada PMKS sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan produktivitasnya. Adapun peran ini adalah untuk memperoleh sumber daya dari luar, tetapi dilakukan secara seimbang seperti pelatihan pengembangan potensi dari orang yang berbeda. Balai PMKS ikut serta dalam peran ini dengan cara mendukung realisasi dalam rencana dan kerja yang ditunjukkan untuk mewujudkan PMKS yang berpotensi.

Wawancara dengan Ibu Rofiqo selaku staff pelayanan :

“Balai PMKS Sidoarjo bekerjasama dengan berbagai lembaga/instansi yang ada seperti dengan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Polsek Sidoarjo, Dinas Pertanian Sidoarjo, Sanggar Senam Ceria Sidoarjo, Sekertaris PAMMI Sidoarjo, Kanwil Kemenag Sidoarjo, dan Poltekes Sidoarjo” (wawancara tanggal 19 Juli 2023)

Peran ini bukan hanya menjalani keterampilan saja tetapi juga Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo sangat aktif dalam keterlibatan berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti mengadakan kegiatan acara pemeriksaan kesehatan dari puskesmas sidoarjo, pemeriksaan kejiwaan oleh rsj lawing, serta berbagai kegiatan yang diadakan oleh Balai PMKS Sidoarjo untuk mencapai suatu tujuan agar memudahkan aksesibilitas PMKS dalam menjangkau sumber-sumber atau pelayanan yang dapat diperoleh untuk meningkatkan kesejahtraannya.

Wawancara dengan Ibu Rofiqo selaku staff pelayanan :

“Kita bekerjasama dengan RSJ menur maupun RSJ lawang tujuannya agar memudahkan akses kita dalam membina penerima manfaat, karena di balai kita bukan hanya membina penyandang gelandangan dan pengemis saja, akan tetapi penyandang psikotik juga, sehingga membutuhkan rujukan ke RSJ agar ketika jika penyandang psikotik mengalami yang istilahnya kumat atau kambuh langsung bisa dibawa ke RSJ lawang maupun menur untuk mendapatkan rehab yang mana biasanya ketika penyandang direhab dimenur rentang waktunya antara minimal 3 bulan setelah itu klien dikembalikan lagi ke balai PMKS sidoarjo.” (wawancara tanggal 19 Juli 2023)

Pelayanan rehabilitasi kesehatan yang dilakukan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS yang mendatangkan dari pihak puskesmas atau rumah sakit sekitar yang telah ditetapkan dengan menggunakan sistem rujukan. Pelayanan berupa pemberian obat yang diresepkan oleh Puskesmas Sidoarjo, Psikiater, RSUD Sidoarjo,

RSJ Lawang maupun RSJ Menur. Untuk bimbingan sosial, yang lebih mengarah pada rehabilitasi perilaku yakni bagian dari proses rehabilitasi sosial baik berupa Pendidikan bela Negara, pendidikan militer dasar, maupun bimbingan fisik lainnya yang diasuh oleh Polsek Sidoarjo.

Dalam peran ini Balai PMKS memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya pada penyandang psikotik agar dapat berkesempatan untuk melatih keterampilannya sesuai dengan minat dan kemampuannya. PMKS melakukan keterampilan yang ada seperti sulam pita, menjahit, serta membuat kerajinan-kerajinan lain dan Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2023 berharap agar yang diberikan kepada penerima manfaat dapat bermanfaat engan baik untuk kemajuan serta kesejahteraan penyandang masalah kesjahteraan sosial tersebut.

Variabel peran representasional sangatlah penting dalam sebuah proses peran pelayanan PMKS. Dimana dengan adanya peran representasional ini pihak Balai PMKS dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi. Pada variabel ini penulis dapat menyimpulkan bahwa peran representasional dalam bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan proses Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan sesuai karena telah menjalankan kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi sehingga penerima manfaat telah mendapatkan pelatihan serta bimbingan melalui sumberdaya dari luar, meliputi kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, tindakan promosi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain, melakukan tindakan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya penyandang psikotik[15].

#### **4) Peran Teknis**

Berkaitan dengan peran teknis, dalam hal ini Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah memiliki kemampuan dan kualitas dalam mengumpulkan data dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data dalam mengelola dan menginput data. Kemampuan mnggunakan komputer dalam melaksanakan tugas penginputan data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kegiatan serta kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan pengembangan prnyandang masalah kesejahteraan sosial [16].

Penerima manfaat yang baru datang dan menjadi calon rehabilitasi baru di Balai PMKS harus diregistrasi, observasi dan di identifikasi permasalahan dan kondisinya serta diberi akomodasi dan asrama. Tahap admininstrasi merupakan pendtaan berkas-berkas administrasi tentang asal-usul calon penerima manfaat yang akan diterima oleh Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Wawancara dengan Ibu Kris selaku bidang Rehabilitasi Sosiasl (RESOS) :  
“Memang sebelum balai menampung pembinaan terhadap calon klien, terlebih

dahulu calon klien harus diidentifikasi serta melakukan pendataan-pendataan sebagaimana sesuai latar belakang calon klien. Selanjutnya ketika klien sudah masuk dalam kriteria PMKS yang sudah ditetapkan dalam peraturan Balai, maka klien berhak mendapatkan pelayanan dari awal sampai dengan akhir sesuai dengan yang dibutuhkan kondisi fisik maupun mental yang telah dicatat dari data latar belakangnya serta mendapatkan pelayanan advokasi sosial dimaksudkan untuk mengusahakan klien mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dengan mengindahkan hak dan martabat manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (wawancara tanggal 19 Juli 2023)

Adapun kegiatan yang dilaporkan seperti perkembangan penyandang serta permasalahan-permasalahan atau kebutuhan lainnya termasuk informasi-informasi pendataan mengurus surat rekomendasi untuk melakukan penanganan selanjutnya setelah penyandang menyelesaikan rehabilitasi , agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan para penyandang dan sesuai dengan pelayanan yang dapat diterima selanjutnya. Penerima manfaat yang baru datang dan menjadi calon rehabilitasi baru di Balai PMKS harus diregistrasi, observasi dan diidentifikasi permasalahan dan kondisinya serta diberi akomodasi dan asrama. Tahap administrasi merupakan pendataan berkas-berkas administrasi tentang asal-usul calon penerima manfaat yang akan diterima oleh Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Dalam pengumpulan data telah sesuai hal ini dalam pengumpulan data yang telah maksimal setiap tahunnya Balai PMKS mempunyai data terbaru hal tersebut dapat berpengaruh dalam proses pelayanan secara merata. Dalam input dan analisis data kreatifitas pegawai dalam menciptakan suasana nyaman. Pegawai Balai PMKS telah memiliki kemampuan yang baik dalam input data dan analisis data [17].

## CONCLUSION

Hasil pembahasan dan temuan-temuan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Fasilitatif dalam Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan berhasil sesuai yang dijelaskan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008). Pertama, Peran Fasilitatif dalam peran balai pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dinas sosial provinsi jawa timur dalam pelayanan penyandang psikotik sudah dikatakan berhasil karena sudah terpenuhi dan cukup memadai Sarana dan Prasarana yang telah diberikan oleh Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan memfasilitasi seperti asrama, kamar mandi, ruang makan, ruang bimbingan, mushola, dan lain sebagainya. Kedua, Peran Edukasi dapat dikatakan sudah cukup baik dalam memberikan berbagai program

pelayanan bimbingan dalam proses rehabilitasi PMKS untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mensejahterakan atau memfungsikan kembali serta memfungsikan kembali atau menyempurnakan kemahiran fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas khususnya terhadap penyandang psikotik. Dengan adanya berbagai macam program pelayanan yang diberikan oleh pihak balai kepada penerima manfaat tentu dapat melatih bakat atau keterampilan yang dimiliki penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut untuk dapat dikembangkan kembali. Selain itu juga agar penerima manfaat dapat membentuk diri menjadi tangguh dan berakhlak mulia serta menjadikan penerima manfaat menjadi produktif dan sehat.

Ketiga, Peran Representasional dalam peran ini Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS juga telah memberikan peran yang sangat baik karena telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga dari luar untuk memperoleh sumberdaya dari luar dalam pengembangan potensi atau keterampilan setiap PMKS sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan produktivitasnya. Keempat, Peran Teknis dalam peran ini menjelaskan bahwa penerima manfaat yang baru datang dan menjadi calon rehabilitasi baru di Balai PMKS harus diregistrasi, observasi dan diidentifikasi permasalahan dan kondisinya. Dalam peran teknis Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan kuat untuk mengumpulkan data dan menganalisis data menggunakan komputer, presentasi lisan dan tertulis, manajemen serta melakukan penilaian kebutuhan untuk pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat.

## REFERENCES

- [1] Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 tentang Tata Kelola Peralihan dari UPT ke Balai Pelayanan
- [2] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- [3] Hamidi, Jazim (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak. Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, jurnal: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 23, No 4, 2016
- [4] Yulianingsih, W. (2017). Pelaksanaan Program pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Menjahit Bagi Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Peserta Didik di LKP Modes Muria Sidoarjo-Jawa Timur. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 1(1), 29-36.
- [5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Simanjuntak, Julianto. *Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [6] Syamsi, Ibnu dan Haryanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : UNY Press,

2018.

- [7] Nagaring, Denny David, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)." *Governance* 1.2 (2021).
- [8] Al Fata, Rifqul Islam. Peran balai pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Sidoarjo dalam membina klien. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- [9] Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Governance*, 1(2)..
- [10] Akbar, M. Z. Y. (2019). Peran Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Desa Grinting). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 201-210..
- [11] Ife, Jim ; Tesoriero, Frank ; Saifuddin Zuhri Qudsy ; Manulang, Sastrawan ; Nurul Yakin ; Nursyahid, 2014. M..*Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi / Penulis, Jim Ife & Frank Tesoriero ; Penerjemah, Sastrawan Manurung, Nurul Yakin, M. Nursyahid ; Penyunting, Saifuddin Zuhri Qudsy .*
- [12] Sugiyono., 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [13] Asyhari, M. Farid. Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau Pmks (Studi Kasus Korban Narkotika/napza). Diss. State University of Surabaya.
- [14] E, Koeswara. *Logoterapi, Psikoterapi Viktor, Frankl*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002
- [15] Simanjuntak, Julianto. *Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [16] Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Gunawan, Ary H. 2000. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta